

IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN: SOLUSI DAN TANTANGAN

Sahrul Pora^{1*}, Dafrin Muksin², Al Fauzi Rahmat³

¹Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, THP, Politeknik Perikanan Negeri Tual. Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. Indonesia

³Doctoral School of Economic and Regional Sciences Universities, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Hungary

*Korespondensi: sahrulpora28@gmail.com

Citation (APA):

Pora, S., Muksin, D., & Rahmat, A. F. (2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran: Solusi dan Tantangan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 635–694.
<https://doi.org/10.33506/jn.v11i2.4352>

Email Autors:

sahrulpora28@gmail.com
dafrin96@gmail.com
rahmat.al.fauzi@phd.uni-mate.hu

Submitted: 09 April, 2025

Accepted: 05 Desember, 2025

Published: 25 Desember, 2025

Copyright © 2025 Sahrul Pora, Dafrin Muksin, Al Fauzi Rahmat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi program makan bergizi gratis. Tujuannya untuk mengetahui isi dari program ini serta implementasinya dilapangan. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui berbagai media online, website kementerian, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis telah dilaksanakan 6 Januari tahun 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, menekan angka stunting dan peningkatan motivasi belajar siswa. Sasarannya pada peserta didik, balita dan ibu hamil. Dalam pelaksanannya, Implementasi program makan bergizi gratis menghadapi tantangan dalam komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pemerintah telah melakukan sosialisasi secara luas dengan berbagai platform media dan secara langsung, namun daerah terpencil masih mengalami kendala akses informasi secara digital. Dari aspek sumber daya, alokasi anggaran yang besar belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, menyebabkan kendala dalam distribusi. Disposisi pelaksana juga berperan penting, dengan di dukungan oleh pelaksanaan dibawahnya. Akan tetapi, kasus penolakan di beberapa daerah menunjukkan perlunya peningkatan kesiapan di lapangan

Kata kunci: Implementasi; Program; Makan Bergizi Gratis

ABSTRACT

This research examines the implementation of the free nutritious meal program. The aim is to find out the content of this program and its implementation in the field. The method used is qualitative research with a descriptive approach. Data was obtained through various online media, ministry websites, and other documents. The results showed that the free nutritious meal program was implemented on January 6, 2025. This program aims to improve human resources, reduce stunting rates, and increase student learning motivation. The targets are students, toddlers, and pregnant women. The implementation of the free nutritious meal program faces challenges in communication, resources, executor disposition, and bureaucratic structure. The government has conducted extensive socialization with various media platforms and in person, but remote areas still experience problems accessing digital information. In terms of resources, the large budget allocation has not been fully matched by infrastructure readiness, causing constraints in distribution. The disposition of implementers also plays an important role, with support from lower-level implementers. However, cases of rejection in some areas show the need for increased readiness in the field

Keywords: Implementation; Program; Free Nutritious Meal

PENDAHULUAN

Kebijakan publik dibuat oleh orang-orang atau lembaga yang diberi otoritas oleh undang-undang, yaitu pemerintah dalam arti luas dan sempit (Sutmasa, 2021). Melalui penetapan undang-undang, proses selanjutnya ialah pelaksanaan kebijakan di mana berbagai sumber daya, prosedur, organisasi, dan lainnya

bekerja sama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan (Handayani dkk., 2021). Dengan demikian maka kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh lembaga atau aparatur negara yang berwenang, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk melaksanakan tujuan negara. Dalam hal ini, pemerintah dapat menetapkan kebijakan melalui musyawarah dengan lembaga seperti itu untuk memajukan masyarakat karena kebijakan tersebut dapat merajai kehidupan masyarakat (N dkk., 2021).

Kebijakan mengacu pada tindakan yang diambil seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan kebijakan adalah untuk mencari cara untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran tersebut (Masnah dkk., 2021). Kesuksesan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, atau institusi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik tidak menjamin bahwa pelaksanaannya akan berhasil (Heti Aisah dkk., 2021). Hal itu karena implementasi kebijakan adalah proses yang sangat kompleks dan sering politis, dengan berbagai intervensi dari pihak yang berkepentingan (Prihartono dkk., 2025). Adapun beberapa model implementasi kebijakan, seperti menurut Van Meter dan Van Horn, (1975) yakni, tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Shauma & Purbaningrum, 2022). Selain itu, model implementasi kebijakan menurut Edwar III diantaranya, komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi (Lestari dkk., 2024).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan terkait impelementasi kebijakan. Dalam implementasi Kebijakan Automatic Adjustment pada Operasional Satuan Kerja Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, terdapat kekurangan indikator standar dan tujuan kebijakan, seperti kurangnya pemahaman tentang tujuan implementasi kebijakan serta kurangnya standar berupa regulasi atau peraturan turunan yang mengatur lebih detail tentang implementasi kebijakan automatic adjustment tersebut (Hantana dkk., 2025). Dalam implementasi kebijakan kebijakan untuk penanggulangan Covid19 di Sampang, faktor kekurangan sumber daya anggaran menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak maksimal (Hidayat, 2021). Dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2016 tentang kebijakan Kota layak anak di Kota Pekanbaru, sikap pelaksana kebijakan menjadi masalah utama karena terkesan menanggap kebijakan ini bukanlah sebuah prioritas (Swis Tantoro, 2020). Di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi masih belum berjalan dengan baik. Sumber daya manusia masih kurang baik dari segi kuantitas dan kualitas pelaksana (Shauma & Purbaningrum, 2022).

Pada era pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini, terdapat program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan. Program ini merupakan bagian dari implementasi dari janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini akan berdampak pada hampir 83 juta anak sekolah, balita, dan ibu hamil, dengan anggaran awal 100 triliun rupiah dan dapat mencapai 460 triliun rupiah pada tahun 2029 (Dwijayanti, 2024). Tujuan utama program ini adalah untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dengan fokus khusus pada anak-anak dan ibu hamil. Rencana pelaksanaan program ini telah berubah sejak diumumkan (Tambunan dkk., 2025). Program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan berkontribusi pada pembentukan

sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan kompetitif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal bekerja sama untuk mengelola distribusi makanan, mengawasi pelaksanaan, dan memberikan edukasi gizi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat (Sarjito, 2024).

Studi terbaru telah mengeksplorasi implementasi dan dampak dari program makanan bergizi gratis, khususnya di sekolah-sekolah. Program-program ini telah menunjukkan manfaat yang signifikan terhadap status gizi anak-anak, termasuk peningkatan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan penurunan prevalensi anemia (Desiani & Syafiq, 2025). Program MBG dapat meningkatkan kehadiran siswa, menurunkan stunting dan malnutrisi di sekolah, dan meningkatkan prestasi akademik (Qomarrullah dkk., 2025). Selain dampak kesehatan, kebijakan tersebut juga dapat memberikan dampak limpahan terhadap sektor pertanian, yang berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk lokal dan memperkuat pasar petani (Dwijayanti, 2024). Upaya untuk mempromosikan makanan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman telah dilakukan melalui festival dan inisiatif pendidikan (Pical dkk., 2022). Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan seperti peningkatan kesehatan siswa dan akses terhadap makanan bergizi, tetapi juga menyoroti tantangan seperti keterbatasan anggaran dan masalah logistik (Eliza dkk., 2024). Namun, pelaksanaan program-program ini dapat menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan keuangan dan kualitas makanan yang tidak konsisten (Zanesty dkk., 2025).

Meskipun studi-studi sebelumnya banyak mengulas manfaat dari program makanan bergizi gratis, nyatanya program ini tetap mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak. Kritikan yang muncul disebabkan oleh realisasi dari program tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar. Besaran anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program makanan bergizi gratis tentunya akan memberikan beban fiskal bagi keuangan Indonesia. Selain itu, program tersebut dikwatirkan akan memberikan dampak negatif pada sektor lain, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Apalagi Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran, sehingga muncul juga keraguan mengenai efektivitas dan prosedur pelaksanaan program ini. Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah dikemukakan, penelitian ini akan mengakaji lebih mendalam terkait implementasi dari program makanan bergizi gratis. Teori implementasi kebijakan dari Edwar III akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis terkait pelekasanaan dan tantangan dari program makanan bergizi gratis. Penelitian ini perlu dilakukan sebab makanan bergizi gratis merupakan program unggulan di masa pemerintahan Prabowo Gibran.

METODE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau subjek, perlunya dilakukan penelitian secara sistematis. Penggunaan metode dalam sebuah penelitian menjadi sebuah kunci dalam mengungkap sebuah fenomena secara sistematis. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Menurut Utama dkk, (2019) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian deskriptif yang biasanya menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih diprioritaskan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai dasar untuk menyesuaikan fokus penelitian dengan data lapangan. Ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan bahan untuk diskusi tentang temuan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui berbagai pemberitaan di media online nasional yang kredibel serta dokumen penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisa data untuk mengungkap masalah yang diteliti yaitu terkait implementasi program makan bergizi gratis. Dalam analisis data kualitatif untuk penelitian ini, terdapat tiga tahap yang dilalui oleh peneliti, diantaranya reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap di sini.

1. Reduksi Data: Cara peneliti mengumpulkan data adalah topik utama.
2. Menampilkan Data. Dalam penelitian deskriptif kualitatif dapat menggunakan grafik, uraian singkat, atau hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini peneliti lebih banyak menguraikan data kemudian menghubungkan antar kategori. Tujuan menampilkan data adalah untuk membuat lebih mudah bagi orang untuk memahami apa yang terjadi.
3. Membuat kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dari program makan bergizi gratis merupakan bagian dari pemenuhan janji-janji kampanye yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran sejak menjadi calon presiden. Sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan nutrisi anak sekolah dan ibu hamil. Untuk memahami implementasi dari program makan bergizi gratis, teori terkait model implementasi kebijakan dari Edwar III akan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan dari program ini.

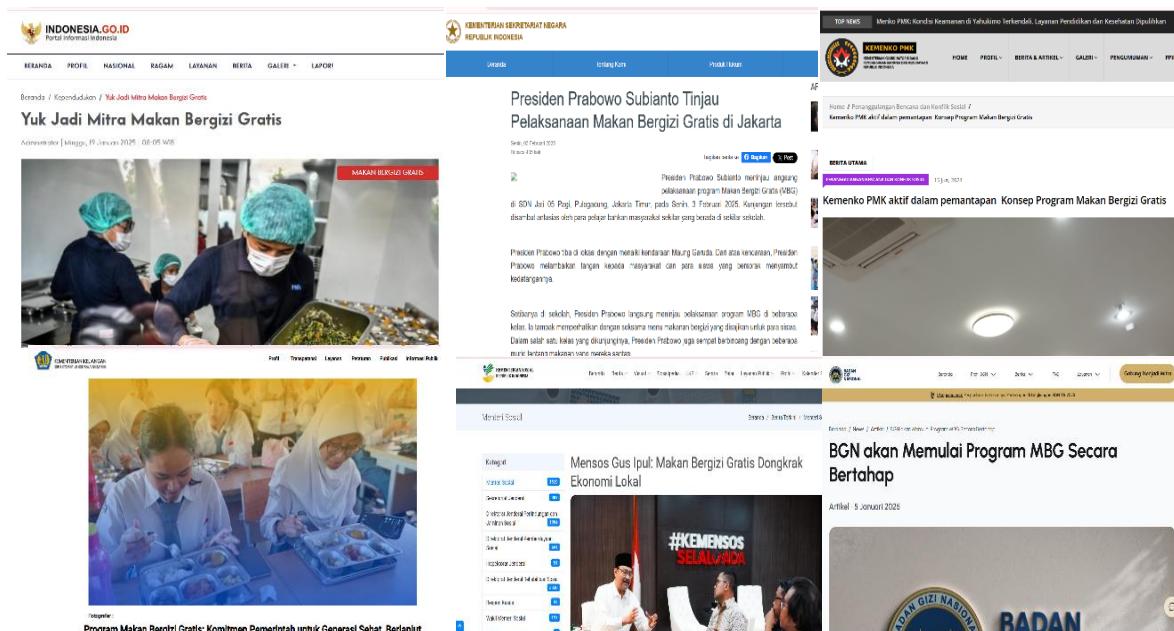
Komunikasi

Komunikasi sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan publik. Agar implementasi efektif terjadi, pembuat keputusan harus tahu apa yang akan mereka lakukan. Setiap keputusan kebijakan harus ditransmisikan atau diberitahukan kepada bagian personalia yang tepat agar mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Selain itu, komunikasi kebijakan harus akurat, tepat, dan konsisten. Pembuat keputusan dan implementor harus berkomunikasi (atau berbagi informasi) agar mereka dapat terhubung. (Hidayat, 2021). Dengan demikian maka keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan komunikasi yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Semakin baik koordinasi dan komunikasi ini, semakin sedikit kemungkinan kesalahan. Dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis komunikasi yang terbangun antar berbagai pihak yang terlibat menjadi sangat penting. Selain itu, pemerintah harus menyampaikan program tersebut secara jelas kepada sekolah maupun pihak lain yang akan menjadi penerima dari program tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Lembaga Penelitian Kebijakan Publik Indonesia, orang yang mengetahui adanya saluran komunikasi pengaduan, merasa lebih percaya pada program makan bergizi gratis daripada orang yang tidak mengetahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang baik. Dalam pelaksanaan program makan siang gratis, ada beberapa elemen komunikasi yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat mengetahui tujuan, mekanisme, dan keuntungan dari program makan siang gratis. Agar informasi dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, sosialisasi ini harus dilakukan melalui berbagai media, baik online maupun offline. Laporan berkala harus diberikan oleh pemerintah dan sekolah, yang mencakup informasi tentang anggaran yang digunakan, jumlah penerima manfaat, dan

kualitas dan jenis makanan yang diberikan (Ibrizah, 2025). Terkait itu, adapun beberapa website pemerintah yang intens mensosialisasikan terkait program makan bergizi gratis.

Gambar I. Pemberitaan Program Makan Bergizi Gratis di Beberapa website Kementerian



Sumber: Website resmi Kementerian, 2025

Melalui website resminya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara resmi dimulai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2025 program tersebut dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan akan dimulai secara bertahap sesuai dengan jadwal masuk peserta didik sekolah (Badan Gizi Nasional, 2025). Karena mengutamakan anak-anak dan dimulai dengan perencanaan yang baik dan data yang akurat, program MBG bertujuan untuk menyiapkan generasi emas dan menuju Indonesia Emas (Khalsotussurur, 2025). Selain itu, Pemerintah berharap dapat menekan angka gizi buruk dan stunting melalui inisiatif ini, yang juga akan meningkatkan ketahanan pangan nasional (Mochamad, 2025). Lebih lanjut, Jelsi Natalia Marampa selaku Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan kemenko PMK menyampaikan bahwa Program pemberian makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan perkembangan anak dengan meningkatkan durasi belajar. Peningkatan pendaftaran, peningkatan kehadiran, dan penurunan putus sekolah adalah sumber peningkatan ini (Kemenko PMK, 2024).

Untuk memastikan bahwa program ini dapat dipahami oleh semua pihak, Kementerian Komunikasi dan Informasi sudah mengeluarkan anggaran sebanyak 10 Miliar untuk melakukan sosialisasi (Times, 2024). Menurut Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, sosialisasi dan kampanye yang efektif adalah kunci keberhasilan program makan bergizi gratis. Ia menyatakan bahwa program makan bergizi gratis dimulai di 190 lokasi di 26 provinsi. Pada akhir Januari 2025, pemerintah berharap program dapat mencakup 937 titik layanan. Dia menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program, Kemkomdig bertanggung jawab untuk menyebarkan sosialisasi program melalui berbagai metode komunikasi (antaranews.com, 2025). Selain itu, Wamen Kemendikdasmes Fajar Riza UI Haq mengatakan bahwa

program makan bergizi gratis akan dimulai secara bertahap karena banyak hal yang harus diperhatikan (BKHM, 2025).

Soasialisasi terkait program makan bergizi gratis dialakukan oleh setiap kementerian yang terlibat dalam program ini. Bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai makam cara. Selain sosialisasi secarang langsung, berbagai kementerian terkait jugma memanfaatkan website resmi kementerian, Akun media sosial maupun chanel youtube untuk turut mensosialisasikan program makan bergizi gratis. Sebagaimana menurut Sihombing, (2024), Untuk menyebarkan dan mengajarkan program makan bergizi gratis, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menggunakan berbagai strategi, salah satunya adalah menggunakan media sosial. Sosialisasi terkait program makan bergizi gratis memang penting untuk disampaikan. Hal itu agar terbangun pemahaman yang sama dari setiap institusi yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Semakin baik pemahaman terkait program ini, maka akan semakin efektif pula program ini dijalankan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa efektivitas program ini sangat bergantung pada kejelasan, konsistensi, dan jangkauan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi program telah dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media online, website resmi kementerian, media sosial, dan kampanye langsung di lapangan. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus untuk meningkatkan penyebarluasan informasi guna memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat, mulai dari sekolah, siswa, hingga masyarakat luas, memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program ini. Selain itu, laporan berkala mengenai jumlah penerima manfaat, alokasi anggaran, serta kualitas makanan yang diberikan juga menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas program. Meskipun telah dilakukan upaya komunikasi yang masif, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap media digital.

Sumber Daya

Sumber daya kebijakan adalah komponen yang harus lebih diperhatikan karena jika tidak ada sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi gagasan atau rencana yang tidak memiliki pengaruh apa pun, terutama dalam memecahkan masalah di lapangan. Kualitas sumber daya instansi akan sangat berpengaruh pada bagaimana kebijakan dilaksanakan. Untuk memastikan hasil akhir yang diharapkan, sumber daya manusia dan finansial harus tersedia dan benar-benar disiapkan (Mursalim, 2017). Dalam konteks implementasi program makan bergizi gratis, ketersediaaan sumber daya manusia dan finansial merupakan faktor penting yang memastikan program tersebut berhasil dijalankan.

Untuk sumber daya finansial, program makan bergizi gratis menggunakan anggaran dari APBN. Menurut Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, program makan bergizi gratis telah mendapatkan dana senilai Rp 71 triliun (Kompas, 2025). Namun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program makan bergizi gratis karena dianggap masih kurang (Prayoga, 2025). Jika kalkulasi kebutuhan anggaran per hari, program makan bergizi gratis akan membelanjakan Rp 800 miliar untuk membeli bahan makanan (Yolandha, 2024). Lebih lanjut, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan,

anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 400 triliun lebih hingga Desember 2025. Penggunaan anggrana sebesar itu kalau programma makan bergizi gratis diberlakukan kepada seluruh wilayah indonesia (Kompas, 2025).

Berdasarkan beberapa keterangan sumber daya anggrana yang dibutuhkan tersebut, tentunya program ini menjadi salah satu program yang akan menguras APBN Indonesia. Bahkan dalam berbagai pemberitaan, akibat dari program prioritas tersebut sehingga pada tahun ini terjadi efesiensi anggaran yang besar-besaran di banyak kementerian. Sebagaimana yang diberitakan, Efisiensi Belanja Kementerian dan Lembaga, dikeluarkan oleh Sri Mulyani pada 24 Januari 2025. Disebutkan bahwa anggaran efesiensi akan digunakan untuk program yang dianggap prioritas pemerintah, seperti program makan bergizi gratis (Mardatila, 2025).

Sedangkan untuk ketersediaan sumber daya manusia, menurut Kepala Badan Gizi Nasional, bahwa untuk memenuhi seluruh kebutuhan program, tiga pegawai Badan Gizi Nasional akan ditempatkan dalam satu unit pelayanan. Jumlah pegawai ini adalah tiga orang per satuan pelayanan, yang berarti ada 90 ribu orang, dan akan dibutuhkan setidaknya 45 hingga 46 petugas untuk memasak makanan dalam satu unit pelayanan. Oleh karena itu, akan ada peluang kerja baru berdasarkan perhitungan. Di daerah-daerah tertentu, masak-masak tergantung pada alat masak yang digunakan, jika alat masak tradisional digunakan, diperlukan sekitar 45 hingga 46 orang. Dengan demikian maka akan ada 1,5 juta peluang kerja baru untuk 30 ribu layanan (merdeka.com, 2024).

Selain persoalan anggaran dan tenaga pekerja, ketersediaan sarana dan prasarana dan kualitas dari makanan itu sendiri menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam berbagai pemberitaan dijelaskan bahwa implementasi dari program makan bergizi gratis masih mengalami berbagai masalah. Sebagaimana pemberitaan dari DetikNews, (2025), bahwa uji coba makan gratis di Brebes, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa distribusi makanan tertunda di beberapa sekolah, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan infrastruktur dan transportasi adalah penyebabnya. Kemudian Misalnya, di Makassar, menu disiapkan oleh pihak ketiga, yang kadang-kadang menyebabkan masalah operasional. Sebuah uji coba yang dilakukan di Makassar menunjukkan bahwa beberapa siswa tidak menyukai lauk tertentu, seperti sayuran, sehingga makanan yang dikonsumsi menjadi sia-sia. Ini menunjukkan bahwa menu tidak disesuaikan dengan kebiasaan makan lokal. Kemudian pemberitaan selanjutnya dari Suara.com, (2025), pemerintah mengakui program MBG belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sebagaimana menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, masih ada beberapa kekurangan, seperti pengiriman yang tidak tepat waktu, terutama di hari awal, rasa yang buruk, dan menu yang kurang banyak.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas, dari sisi finansial, meskipun program ini telah mendapatkan alokasi anggaran besar dari APBN, kebutuhan dana yang sangat tinggi menimbulkan tantangan dalam distribusi yang efisien dan berdampak pada efisiensi anggaran di berbagai kementerian. Bahkan, defisit APBN dikaitkan dengan besarnya anggaran yang diserap oleh program ini. Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, pemerintah berupaya menciptakan peluang kerja baru melalui rekrutmen tenaga kerja di setiap unit pelayanan, namun kebutuhan tenaga kerja yang besar tetap menjadi tantangan, terutama dalam hal pelatihan dan kesiapan operasional. Selain itu, kendala dalam infrastruktur dan distribusi juga menghambat kelancaran implementasi, terutama di daerah terpencil. Uji coba program di

beberapa wilayah menunjukkan adanya keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian menu dengan kebiasaan makan lokal, serta kualitas makanan yang kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program MBG memiliki dukungan sumber daya yang besar, masih terdapat kendala signifikan dalam aspek pengelolaan anggaran, efektivitas tenaga kerja, serta kesiapan infrastruktur yang perlu segera diatasi agar implementasi program dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Disposisi

Sikap pelaksana kebijakan berkaitan dengan kecenderungan pelaksana dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Sikap tersebut menyangkut dengan pengetahuan yang dimiliki, sudut pandang pelaksana terhadap tujuan kebijakan, dan tingkat respons terhadap kebijakan. Selain itu, sikap pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan (Nainggolan dkk., 2022). Keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh respons pelaksana. Para implementor harus berkomitmen untuk menerapkan kebijakan publik sebagai hasil dari respons yang baik. Selain itu terdapat beberapa aspek lainnya yang bisa menjelaskan terkait indikator sikap pelaksanaan dalam melaksanakan program makan bergizi gratis diantaranya seperti pemahaman pelaksana, resistensi atau dukungan, koordinasi antara pelaksana dan respon terhadap hambatan serta tantangan.

Aspek yang paling utama ialah komitmen dari pemerintah itu sendiri. Sebab program makan bergizi gratis membutuhkan komitmen dan konsistensi agar program dapat berjalan dengan maksimal. Komitmen tersebut sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program ini dengan mengalokasikan anggaran besar dan menetapkan target penerima yang luas. Program ini direncanakan menjangkau hingga 82,9 juta penerima, slain itu komitmen diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran ratusan triliun agar program makan bergizi gratis bisa berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi penerima. Menurut Hariqo Wibawa Satria, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), program makan bergizi gratis menunjukkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda (Kompas, 2024).

Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Program ini tidak hanya menyediakan makanan untuk siswa, tetapi juga merupakan bagian dari rencana besar untuk meningkatkan pendidikan nasional. Lapar mengganggu konsentrasi dan prestasi siswa saat mereka tiba di sekolah. Program Makan Bergizi Gratis dibuat untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, yang memungkinkan mereka untuk belajar dengan lebih fokus dan dengan hasil yang lebih baik (Mochamad, 2025). Selama hampir delapan bulan, Badan Gizi Nasional telah melakukan uji coba program untuk meningkatkan pemahaman mereka dan mempersiapkan implementasi yang efektif. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing daerah serta struktur menunya. Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan pelaksana memiliki pemahaman yang baik tentang teknis pelaksanaan program (Kompas, 2025).

Dalam pelaksanaannya diberbagai sekolah, program ini mendapatkan respon yang ppositif dari pelaksanaan di sekolah. Hal itu terlihat dari sikap Kepala sekolah SD Negeri 24 Rufei, SD Negeri 9 dan SMA Negeri 4 Kota Sorong yang mengucapkan terima kasih atas program ini. Ia menekankan bagaimana MBG telah memengaruhi kehidupan sehari-hari siswa (Direktorat Jenderan Pendidikan Vokasi, 2025). Kemudian

Kepala SDN Kedung Badak 1 Bogor, menyatakan bahwa program makan bergizi gratis memiliki dampak positif yang signifikan terhadap siswa. Program ini mengajarkan siswa bagaimana menghargai pekerjaan orang lain (Febrinastri & Firmansyah, 2024). Siswa dan guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rawa Kompeni menyukai program pembiasaan makan bergizi gratis. Program ini berdampak pada jumlah siswa yang hadir di sekolah (Liputan6.com, 2024). Pemerintah melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis tidak ada pungutan tambahan baik dari sekolah maupun orang tua siswa sebab semua anggrannya bersumber dari APBN (Iswinarno & Ardiansyah, 2024).

Meskipun para pelaksanaan dalam hal ini adalah sekolah memberikan dukungan, dalam pelaksanannya mendapatkan beberapa penolakan serta masalah yang muncul. Pada Senin, 17 Februari 2025, ribuan pelajar berunjuk rasa di Wamena, Papua Pegunungan, menolak kebijakan MBG. Sekitar 3.509 siswa turun ke jalan untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Kemudian di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis, 16 Januari 2025, Setelah makan menu program makan bergizi gratis yang disediakan, beberapa siswa mengalami mual dan pusing. Lilik Kurniasih, kepala sekolah, membenarkan peristiwa tersebut (Tempo, 2025). Untuk itu pemerintah harus serius dalam menangani berbagai proglem tersebut. Penanganan hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan para pelaksana program di daerah-daerah yang bermasalah untuk memberikan pemahaman yang baik serta langsung mengatasi masalah yang muncul.

Indikator disposisi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program makan bergizi gratis sangat dipengaruhi oleh sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan. Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dengan alokasi anggaran yang besar dan cakupan penerima manfaat yang luas, serta melakukan uji coba untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Respon positif dari berbagai sekolah menunjukkan bahwa program ini diterima dengan baik dan memberikan dampak signifikan bagi siswa, terutama dalam meningkatkan kehadiran dan konsentrasi belajar. Namun, beberapa kendala tetap muncul, seperti penolakan di Wamena dan kasus siswa mengalami mual di Sukoharjo, yang mengindikasikan bahwa pemahaman dan kesiapan pelaksana di lapangan masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan memberikan pendampingan lebih intensif kepada para pelaksana, sehingga respons terhadap tantangan yang muncul dapat lebih cepat dan efektif dalam menjamin kelancaran program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua aspek: mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, yaitu standar operasi prosedur (SOP), yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar mereka tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan, kedua ialah regulasi yang tepat (Lestari dkk., 2024). Sesuai dengan penjelasan tersebut maka pelaksanaan program makan bergizi gratis harus memperhatikan beberapa aspek tersebut dengan baik. Hal itu harus dilakukan agar program makan bergizi gratis diimplementasikan sesuai dengan aturan maupun prosedur yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan penjelasan Perpres Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan di bawah tanggung jawab presiden, dan bertanggung jawab penuh

dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Menurut Peraturan tersebut, ada empat kelompok orang yang dapat mengikuti program Makan Bergizi Gratis. Mereka adalah siswa dari PAUD hingga SMA, baik di negeri maupun swasta; anak usia dini; pendidikan dasar dan menengah di sekolah umum; pendidikan kejuruan; pendidikan agama; pendidikan khusus; pendidikan layanan khusus; dan pesantren; dan balita atau anak di bawah lima tahun. Dipertegas oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan bahwa program MBG dilaksanakan secara bertahap. Ini akan mencapai 40% pada tahun 2025, 80% pada tahun berikutnya, dan 100% pada tahun 2029 (Wibawana, 2025). Berkaitan dengan metode penyaluran yang akan dipilih. Tiga inisiatif dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Pertama, mereka akan membangun dapur pusat. Kedua, mereka akan membangun dapur di sekolah atau pesantren yang memiliki minimal 2.000 siswa (Wisnubroto, 2024).

Kemendikdasmen bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan makanan bergizi sampai ke semua orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Setiap lokasi SPPG memiliki dapur kontemporer yang dapat melayani ribuan porsi setiap hari (Kemendikdasmen, 2025). Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widayantini menekankan bahwa untuk menjamin kelancaran program, perlu ada dukungan dari lembaga pemerintah terkait. BGN tidak dapat beroperasi secara mandiri. Untuk memastikan bahwa pemenuhan gizi nasional berfungsi dengan baik di lintas sektor, Badan Gizi Nasional harus menyusun proses bisnis. Penyusunan proses bisnis harus mempertimbangkan kumpulan alur kerja yang saling berhubungan yang digunakan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dengan identifikasi proses yang digunakan untuk mencapai visi dan misi serta pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan proses (MenpanRB, 2024). Itu berarti, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Kemendikdasmen dan kementerian lainnya juga dilibatkan dalam pelaksanaan program ini. Tujuan dari kolaborasi antarinstansi ini adalah untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan efektif.

Dengan demikian maka implementasi program makan bergizi gratis sangat bergantung pada struktur birokrasi yang kompleks dan koordinasi lintas sektor. Keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program ini menegaskan pendekatan birokrasi yang terpusat, tetapi tetap membutuhkan dukungan dari kementerian terkait seperti Kemendikdasmen, Kemenko PMK, dan Kementerian Kesehatan agar program berjalan efektif. Standar operasional prosedur (SOP) dan penyusunan proses bisnis menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran implementasi, termasuk dalam hal distribusi makanan melalui dapur pusat dan dapur sekolah atau pesantren. Namun, tantangan utama dalam implementasi ini adalah potensi birokratisasi yang berlebihan, yang dapat memperlambat efektivitas program, terutama di daerah terpencil. Skema bertahap yang dirancang hingga tahun 2029 menunjukkan upaya pemerintah dalam memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya sebelum cakupan penuh tercapai.

Keberhasilan implementasi ini bergantung pada efektivitas koordinasi antarinstansi serta konsistensi penerapan regulasi di berbagai wilayah, sehingga fleksibilitas dalam pelaksanaan dan kesiapan infrastruktur menjadi faktor penentu utama dalam menjangkau kelompok sasaran secara optimal. Fleksibilitas birokrasi dalam menyesuaikan anggaran menunjukkan adaptabilitas, tetapi tetap memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien. Mekanisme pengawasan oleh KPK

dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah potensi penyimpangan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan program. Oleh karena itu, perbaikan dalam tata kelola birokrasi, termasuk penyederhanaan regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga, menjadi langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas implementasi program ini.

SIMPULAN

Implementasi program makan bergizi gratis sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek. Dari aspek komunikasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk media online, website resmi kementerian, dan kampanye langsung, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk penyebarluasan informasi. Meskipun upaya ini cukup masif, tantangan tetap ada dalam memastikan pemahaman yang merata, terutama di daerah terpencil dengan keterbatasan akses digital. Dari sisi sumber daya, program makan bergizi gratis dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang sangat besar melalui APBN, dengan dibagi dalam beberapa tahap. Akan tetapi masih terdapat infrastruktur yang belum terlalu memadai. Uji coba program menunjukkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian menu dengan kebiasaan lokal, dan kualitas makanan yang kurang optimal.

Selain itu, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada disposisi pelaksana kebijakan. Meskipun pemerintah menunjukkan komitmen kuat dengan cakupan penerima manfaat yang luas dan uji coba yang dilakukan, beberapa kendala tetap muncul, seperti penolakan di Wamena dan kasus siswa mengalami mual di Sukoharjo, yang mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman dan kesiapan di lapangan. Struktur birokrasi yang kompleks juga menjadi tantangan dalam implementasi MBG, terutama karena pendekatan birokrasi yang terpusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Standar operasional prosedur (SOP) dan penyusunan proses bisnis menjadi faktor kunci, namun potensi birokratisasi yang berlebihan dapat memperlambat efektivitas program, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, skema bertahap hingga 2029 dirancang untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya sebelum cakupan penuh tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews.com. (2025, Januari 6). Kemkomdigi sosialisasikan dan pantau Program Makan Bergizi Gratis. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4566458/kemkomdigi-sosialisasikan-dan-pantau-program-makan-bergizi-gratis>
- Badan Gizi Nasional. (2025, Januari 25). BGN akan Memulai Program MBG Secara Bertahap. bgn.go.id. <https://www.bgn.go.id/news/artikel/bgn-akan-memulai-program-mbg-sekara-bertahap>.
- BKHM. (2025, Februari 9). Program Makan Bergizi Gratis: Komitmen Pemerintah dalam Meningkatkan Kesehatan dan Prestasi Siswa. Dikdasmen. <http://www.dikdasmen.go.id/siaran-pers/11941-Program-Makan-Bergizi-Gratis:-Komitmen-Pemerintah-dalam-Meningkatkan-Kesehatan-dan-Prestasi-Siswa>
- Desiani, N., & Syafiq, A. (2025). Efektivitas Program Makan Gratis pada Status Gizi Siswa Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis. *Malahayati Nursing Journal*, 7(1), 27–48. <https://doi.org/10.33024/mnj.v7i1.17497>
- DetikNews. (2025, Januari 17). Mengatasi Kekurangan dalam Program Makan Bergizi Gratis. detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-7733919/mengatasi-kekurangan-dalam-program-makan-bergizi-gratis>

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. (2025, Februari 10). Program Makan Bergizi Gratis: Komitmen Pemerintah dalam Meningkatkan Kesehatan dan Prestasi Siswa | Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/program-makan-bergizi-gratis-komitmen-pemerintah-dalam-meningkatkan-kesehatan-dan-prestasi-siswa>

Dwijayanti, A. (2024). Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor Pertanian. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 281–308. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i2.435>

Eliza, F., Gistituati, N., Rusdinal, R., & Fadli, R. (2024). Analisis SWOT Kebijakan Makan Siang Gratis di Sekolah Menengah Kejuruan. *Juwara Jurnal Wawasan dan Aksara*, 4(1), 121–129. <https://doi.org/10.58740/juwara.v4i1.91>

Febrinastri, F., & Firmansyah, I. (2024, Desember 11). Guru dan Orang Tua Murid Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis. *suara.com*. <https://www.suara.com/news/2024/12/11/162503/guru-dan-orang-tua-murid-apresiasi-program-makan-bergizi-gratis>

Handayani, S., Afrianti, D. A., & Suryandari, M. (2021). Implementasi Kebijakan Angkutan Umum Di DKI Jakarta. *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, 2(1).

Hantana, J. S., Widnyani, I. A. P. S., & Wirata, G. (2025). Implementasi Kebijakan Automatic Adjustment Pada Operasional Satuan Kerja Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bali. *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 109–121. <https://doi.org/10.22225/pi.9.2.2024.109-121>

Heti Aisah, Qiqi Yulianti Zaqqiah, & A. Supiana. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM). *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135. <https://doi.org/10.69775/jpia.v1i2.25>

Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1). <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>

Ibrizah, Z. (2025, Januari 7). Komunikasi Transparan Kunci Sukses Program Makan Bergizi Gratis—TIMES Indonesia. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/523694/komunikasi-transparan-kunci-sukses-program-makan-bergizi-gratis>

Iswinarno, C., & Ardiansyah, N. (2024, Desember 24). Badan Gizi Nasional Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis, Tanpa Biaya Tambahan. *suara.com*. <https://www.suara.com/news/2024/12/24/181054/badan-gizi-nasional-tegaskan-program-makan-bergizi-gratis-tanpa-biaya-tambahan>

Kemendikdasmen. (2025, Januari 7). PAUD Dikdasmen | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kemendikdasmen*. <https://pdm.dikdasmen.go.id/en/media-berita/program-mbg-langkah-strategis-pemenuhan-gizi-dan-penguatan-karakter-siswa>

Kemenko PMK. (2024, 06-15). Kemenko PMK aktif dalam pemantapan Konsep Program Makan Bergizi Gratis | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Kemonko PMK*.

<https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-aktif-dalam-pemantapan-konsep-program-makan-bergizi-gratis?>

Khalisotussurur. (2025, Januari 31). Mensos Gus Ipul: Makan Bergizi Gratis Dongkrak Ekonomi Lokal. kemensos.go.id. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/Mensos-Gus-Ipul%3A-Makan-Bergizi-Gratis-Dongkrak-Ekonomi-Lokal>

Kompas. (2024, Desember 14). Dinali Beri Dampak Positif, Orangtua dan Kepala Sekolah Berharap Program Makan Bergizi Gratis Dilanjutkan. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/14/20285221/dinali-beri-dampak-positif-orangtua-dan-kepala-sekolah-berharap-program>

Kompas. (2025). Program Makan Bergizi Gratis Dimulai 2 Januari 2025 di Seluruh Indonesia. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/19/14583631/program-makan-bergizi-gratis-dimulai-2-januari-2025-di-seluruh-indonesia>

Lestari, N. S., Arenawati, & Stiawati, T. (2024). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dpmptsp Kabupaten Serang.

Liputan6.com. (2024, Agustus 27). Guru Sebut Program Makan Bergizi Gratis Tingkatkan Semangat dan Kehadiran Siswa di Sekolah. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/5685098/guru-sebut-program-makan-bergizi-gratis-tingkatkan-semangat-dan-kehadiran-siswa-di-sekolah>

Mardatila, A. (2025, Februari 11). Pangkas Sana-sini demi Makan Bergizi Gratis. detikx. <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20250211/Pangkas-Sana-sini-Demi-Makan-Bergizi-Gratis/>

Masnah, Lukman, ampara, & Muhi, A. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Renaissance, 6(2).

Media, K. C. (2025, Januari 6). DPR Setujui Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun Masuk APBN 2025. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/06/15111781/dpr-setujui-anggaran-program-makan-bergizi-gratis-rp-71-trilun-masuk-apbn>

Media, K. C. (2025, Januari 7). Zulhas Ungkap Anggaran Program Makan Gratis Tembus Rp 420 Triliun. KOMPAS.com. <https://money.kompas.com/read/2025/01/07/133443626/zulhas-ungkap-anggaran-program-makan-gratis-tembus-rp-420-triliun>

MenpanRB. (2024, Desember 28). Jelang Pelaksanaan Program Makan Bergizi, Menteri PANRB: Kunci Keberhasilan Program Adalah Kolaborasi. Kementerian Pendaragunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/jelang-pelaksanaan-program-makan-bergizi-menteri-panrb-kunci-keberhasilan-program-adalah-kolaborasi>

merdeka.com. (2024, Agustus 8). Program Makan Bergizi Gratis Diklaim Bisa Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja, Begini Hitungannya. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/program-makan-bergizi-gratis-diklaim-bisa-serap-15-juta-tenaga-kerja-begini-hitungannya-211347-mvk.html>

Mochamad, I. (2025, Maret 27). Program Makan Bergizi Gratis: Komitmen Pemerintah untuk Generasi Sehat, Berlanjut Hingga Ramadan. Direktorat Jenderal Anggaran.

- <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/program-makan-bergizi-gratis:-komitmen-pemerintah-untuk-generasi-sehat>.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 14(1), 126–138. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.1>
- N, F. A., Setiawan, F., Saputra, R., Yuliatin, A. T., & Ilham, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal JRPP*, 4(2).
- Nainggolan, A. C., Stiawati, T., & Juliannes Cadith. (2022). Implementasi Programsembako Implementation Of "Sembako" Program. *Jurnal Governansi*, 8(1).
- Pical, V., Nabuasa, C. D., Louhenapessy, L. L. E. L., Nussy, F. S., & Wattimena, S. E. (2022). Upaya Promosi Pangan Lokal Melalui Ajang Festival Pangan Lokal Bergizi, Beragam, Seimbang, Dan AmaN. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering*, 3(1), 26–31. <https://doi.org/10.51556/jpkmkelaker.v3i1.177>
- Prayoga, F. (2025, Januari 17). Badan Gizi Nasional Usul Tambah Anggaran Rp 100 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis di 2025. *Kompas.tv*. <https://www.kompas.tv/nasional/567789/badan-gizi-nasional-usul-tambah-anggaran-rp-100-triliun-untuk-biayai-makan-bergizi-gratis-di-2025>
- Prihartono, D., M. Qudrat Nugraha, Khaerul Umam Noer, & Izzatusholekha. (2025). Implementasi Kebijakan Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Di Kecamatan Jagakarsa. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(01), 124–135. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.22320>
- Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari S, L., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i2.660>
- Sarjito, A. (2024). Free Nutritious Meal Program as a Human Resource Development Strategy to Support National Defence. *International Journal Administration, Business & Organization*, 5(5), 129–141. <https://doi.org/10.61242/ijabo.24.454>
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2).
- Sihombing, J. (2024, September 14). Kemkominfo Punya Strategi Sosialisasi Program Makanan Bergizi Gratis. *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya*. <https://www.rri.co.id/nasional/973112/kemkominfo-punya-strategi-sosialisasi-program-makanan-bergizi-gratis>
- Suara.com. (2025, Januari 28). Pemerintah Akui Program Makan Bergizi Gratis Masih Jauh dari Harapan. *suara.com*. <https://www.suara.com/bisnis/2025/01/28/175009/pemerintah-akui-program-makan-bergizi-gratis-masih-jauh-dari-harapan>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>

- Swis Tantoro, U. S., Zaili Rusli,. (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 18(2), 77–83. <https://doi.org/10.46730/jiana.v18i2.7932>
- Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Produktivitas Belajar Siswa. Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika, 2(2), 21–31. <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i2.1428>
- Tempo. (2025, Februari 19). Rangkaian Persoalan Makan Bergizi Gratis di Berbagai Daerah: Sidoarjo, Sumenep, hingga Wamena | tempo.co. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/rangkaian-persoalan-makan-bergizi-gratis-di-berbagai-daerah-sidoarjo-sumenep-hingga-wamena-1209107>
- Times, I. D. N. (2024, Agustus 11). Kominfo Anggarkan Rp10 M buat Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kominfo-anggarkan-rp10-m-buat-sosialisasi-program-makan-bergizi-gratis>
- Utama, A. A., Pratama, D., & Noercholis, D. F. (2019). Pengabdian Masyarakat: Pelatihan Nvivo 12 Plus Di Psdku Unair Banyuwangi. Kuat : Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, 1(3), 151–154. <https://doi.org/10.31092/kuat.v1i3.625>
- Wibawana, W. A. (2025, Januari 7). Siapa Saja Penerima Makan Bergizi Gratis? Ini Kategori dan Skema Pembagiannya. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7720903/siapa-saja-penerima-makan-bergizi-gratis-ini-kategori-dan-skema-pembagiannya>
- Wisnubroto, K. (2024, November 6). Indonesia.go.id—Ini Tiga Skema Penyaluran Makan Bergizi Gratis. Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8750/ini-tiga-skema-penyaluran-makan-bergizi-gratis>
- Yolandha, F. (2024, Oktober 9). Badan Gizi: Program Makan Bergizi Gratis Habiskan Anggaran Rp 800 Miliar per Hari. Republika Online. <https://republika.co.id/share/sl2age370>
- Zanesty, R. A. R., Adhyaksa, R. P. A. P., & Mahdi, M. H. (2025). Design Thinking Approach For Sustainability of Free Meal Program at Al-Quds Traditional Islamic Boarding School. J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia), 9(2), 81–91. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v9i2.19193>

PROFIL SINGKAT

Penulis lahir pada tanggal 28 Februari 1996, di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Jenjang pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 2017 di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Kemudian menyelesaikan Jenjang S2 pada Tahun 2021 di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sejak 2024, penulis bekerja sebagai sorang Dosen tetap di Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Politeknik Perikanan Negeri Tual, Kabupaten Maluku Tenggara.